

## TAJUK RENCANA

### Ironi Status PPKM di DIY

**PEMERINTAH** menaikkan status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di DIY dari level 3 ke level 4. Tentu ini menjadi ironi di tengah tren menurunnya kasus Covid-19 secara nasional. Bahkan pemerintah telah mencabut aturan yang mewajibkan tes PCR maupun antigen bagi pelaku perjalanan domestik, baik laut, udara maupun darat bagi mereka yang telah divaksin dua serta booster.

Lantas, apa makna kenaikan status PPKM menjadi level 4 bagi DIY? Pertanyaan ini penting diajukan mengingat Pemda DIY tidak bisa melakukan penyekatan di perbatasan, karena dinilai tidak efektif. Konsekuensinya, DIY akan tetap diserbu wisatawan dari berbagai daerah. Bisa dibayangkan, mereka datang ke DIY tanpa melalui tes PCR maupun antigen, bila telah mendapatkan vaksinasi 2 maupun booster. Padahal, mereka yang telah divaksin masih potensial terpapar dan menyebarkan Covid-19.

Inilah yang harus diwaspadai, seiring dengan terbukanya pendatang dari luar DIY. Pemda DIY pun tak mungkin menolak kedatangan mereka, apalagi Pemerintah sedang menggerakkan program ekonomi rakyat dan pariwisata. Barangkali inilah dilema yang harus kita hadapi pada masa penerapan PPKM level 4 ini. Di satu sisi, pembatasan dilakukan melalui pemberlakuan Perda Covid-19, tapi di sisi lain kita membuka pintu seluas-luasnya bagi pendatang untuk masuk DIY tanpa melalui tes PCR maupun antigen.

Jika demikian, maka kunci pengendalian Covid-19 hanya satu yakni penegakan prokes.

Agar penegakan prokes ini efektif, maka harus melalui mekanisme peninjauan sanksi bagi mereka yang melanggar. Bersyukur kita telah memiliki Perda tentang pencegahan Covid-19 yang menjadi payung hukum bagi aparat untuk menjatuhkan sanksi bagi pelanggar, baik berupa teguran lisan, tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Pengenaan sanksi ini diperlukan agar aturan berjalan efektif dan tidak bisa orang sekenanya melanggar prokes.

Kalau kita mau jujur, pelanggaran prokes sebenarnya terjadi di mana-mana, bukan hanya di DIY. Sangat banyak orang yang abai memakai masker, bahkan kita sering menyaksikan orang berkerumun tanpa mengenakan masker. Inilah yang sebenarnya harus ditertibkan. Artinya, kalau kita membuka pintu perbatasan untuk pendatang, konsekuensinya mereka harus disiplin menerapkan prokes, bahkan kalau perlu dengan paksaan mengingat kita sudah memiliki Perda pencegahan Covid-19 sebagai dasar harus melakukan penindakan.

Kita berharap status PPKM level 4 yang berlaku hingga 14 Maret 2022 bisa segera turun dan DIY tidak masuk lagi dalam 5 besar penyumbang kasus Covid-19 di Indonesia. Selanjutnya, kita bisa melewati masa transisi dari pandemi menuju endemi sebagaimana yang diharapkan pemerintah dan masyarakat. Percepatan dan perluasan vaksinasi harus terus dijalankan agar herd immunity terwujud dan kita akan benar-benar memasuki kehidupan baru atau sering dikenal dengan istilah new normal. □

## Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

### Khamim Zarkasih Putro

melainkan juga Áúuntuk yang di atas.Áú. Ke bawah artinya untuk mencapai keadaan ideal, seperti yang dirumuskan dalam tujuan, yakni terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dan terwujudnya kerukunan dan ketenteraman masyarakat. Ke atas, artinya Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, akan mampu membuat tercapainya



KR-JOKO SANTOSO

**SETIAP** ide yang bertujuan menemukan cara terbaik agar ada proses penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, tentu patut disambut baik dan bijak. Pada masa Pemerintahan Orde Baru, upaya serupa diselenggarakan melalui kebijakan yang dikenal dengan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), melalui metode penataran, yang diselenggarakan secara massif dan terpusat. Waktu telah mencatat, program tersebut pada akhirnya justru menimbulkan arus balik. Hal itu dapat dikatakan disebabkan oleh kecenderungan di mana ideologi Pancasila digunakan oleh penguasa untuk mengendalikan sikap kritis, di mana setiap pandangan yang berbeda, dengan mudah mendapat cap anti Pembangunan dan berarti anti Pancasila.

Hadirnya Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, yang telah dibuat DPRD DIY beberapa waktu lalu, dapat dikatakan merupakan terobosan yang diharapkan dapat melahirkan model pendidikan, yang tidak bersifat indoktrinasi dan memaksa, melainkan model yang sungguh-sungguh mendasarkan diri pada nilai-nilai kearifan lokal, terutama kearifan yang diwariskan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX ketika mengambil keputusan bersejarah, yakni menggabungkan wilayah kerajaan ke dalam republik pada 5 September 1945. Kearifan yang melekatkan kekuasaan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat (tahta untuk rakyat).

Artinya, langkah yang disebut dengan Áúmenanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat dan aparat sipil negara.Áú, merupakan program yang mengenai siapa saja, tanpa terkecuali, dan diselenggarakan dengan pendekatan edukasi yang berkearifan lokal, bukan diselenggarakan dengan pendekatan yuridis formal dan pendekatan kekuasaan. Konsep menanam, tidak perlu dimaknai secara sempit, yakni kegiatan yang bersifat satu arah, indoktrinasi, melainkan kegiatan yang bersifat multiarah dan dialogis.

Secara demikian, kegiatan tidak hanya bersifat Áúuntuk yang di bawah,Áú

tujuan Pengaturan Keistimewaan DIY, yakni: a. mewujudkan pemerintahan yang demokratis; b. mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat; c. mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. menciptakan pemerintahan yang baik; dan e. melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

Ukuran keberhasilan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, sebagaimana maksud dari Perda, dapat disederhanakan menjadi: Pertama, kehidupan masyarakat yang guyup rukun, penuh tepa selira, saling

menghormati satu sama lain, saling tolong-menolong dan mampu menyelesaikan setiap masalah yang berkembang dengan dialog, musyawarah yang penuh dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kedua, Pemerintahan DIY akan menjadi teladan di tingkat nasional, bukan karena telah melahirkan Perda Pendidikan dan Wawasan Kebangsaan, tetapi telah mewujudkan maksud Perda, dalam bentuk perilaku pemerintahan yang sepenuhnya mencerminkan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Kemiskinan, kesenjangan sosial, dan berbagai masalah yang ada seperti stunting, atau gizi buruk, KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang merupakan agenda reformasi), anak-anak putus sekolah karena masalah ekonomi, dan masalah-masalah lainnya, akan menjadi masa lalu, karena tidak akan ditemukan lagi di masa depan. Hal tersebut dimungkinkan karena para pejabat publik menghayati dan mengamalkan Pancasila, bukan hanya dalam kehidupan pribadinya, melainkan dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan daerah. Semangat kebangsaan yang diperlukan pemerintah daerah sehingga mampu melahirkan Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, dapat menjadi modal penting untuk melakukan transformasi daerah, sehingga mampu menjadi daerah yang mewujudkan nilai-nilai Pancasila. □

*\*) Dr Khamim Zarkasih Putro, staf pengajar pada UIN Sunan Kalijaga, Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta, dan ICMI Orda Yogyakarta.*

### Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

## Reorientasi Bahan Pangan, Jaga Gizi Masa Pandemi

### Diana Andriyani Pratamawati

tah cenderung berkuat seputar beras.

Kemandirian pangan Indonesia masih rawan, terutama jika dilihat dari komoditas tanaman pangan selain beras. Namun demikian potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia Indonesia diyakini dapat digerakkan dalam upaya pencapaian kemandirian pangan. Sembilan jenis tanaman pangan lokal selain beras yang terdapat di Indonesia antara lain kentang, ubi jalar, talas, jagung, singkong, sukun, garut atau ararut, sorgum, kacang tanah.

#### Potensi Bahan Pangan Selain Beras

Keberadaan hasil olahan dari tanaman pangan tak bisa diabaikan untuk konsumsi masyarakat sehari-hari. Oleh karenanya, demi menjaga ketahanan pangan diperlukan kemandirian pangan dengan konsep memaksimalkan fungsi lahan pekarangan. Tujuannya tidak lain adalah untuk memenuhi kebutuhan perorangan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan kearifan lokal. Budidaya tanaman pangan di rumah tangga sebagai solusi dalam menjaga ketahanan pangan bukan saja tentang kecukupan bahan pangan, namun juga menyangkut kemampuan memproduksi sendiri bahan pangan dengan memanfaatkan sumberdaya lokal. Di lain sisi, pekarangan nantinya dapat menjadi sumber pangan dan gizi keluarga dalam pemenuhan kebutuhan karbohidrat, protein, vitamin dan mineralnya.

Lahan pekarangan atau lahan sempit di sekitar rumah dapat ditanami tanaman pangan, seperti kentang, ubi jalar, maupun talas (konsep urban farming). Dengan pemanfaatan pekarangan ini, maka kebutuhan rumah tangga dapat dicukupi tanpa harus pergi ke pasar atau tempat keramaian sebagaimana anjuran pe-

merintah untuk di rumah saja demi menghindari penularan COVID-19. Namun, pemanfaatan lahan pekarangan ini dengan tanaman pangan memerlukan partisipasi aktif semua kalangan masyarakat.

Beberapa penelitian mengenai Urban Farming menunjukkan persepsi masyarakat dalam program urban farming di Indonesia cukup baik di mana masyarakat mengetahui mengenai jenis dan manfaat dari program urban farming, namun partisipasinya dalam program urban farming belum mencapai maksimal, di mana tidak semua masyarakat ikut terlibat. Kondisi ini memerlukan reorientasi bahan pangan, di mana pemerintah hadir mendampingi pemanfaatan lahan seperti kampanye bahan pangan pokok lokal selain beras dan pelatihan olahan kreatif bahan pangan lokal selain beras. □

*\*) Diana Andriyani Pratamawati SSos. Staf Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.*

## Pojok KR

PPKM DIY naik ke level 4, tegakkan Perda Covid-19.

-- **Dilema karena tidak ada penyekatan perbatasan.**

\*\*\*  
Ketua MPR dorong pemerintah intervensi kendalikan harga pangan.

-- **Ungkap pula spekulasi yang ka-caukan harga.**

\*\*\*  
Pemerintah siapkan transisi dari pandemi ke endemi.

-- **Termasuk menyiapkan masyarakatnya.**

*Berabs*

## PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik  
Naskah dikirim Email atau WA

pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat  
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55232. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

### Sepakbola Boleh Dengan Penonton

**AKHIRNYA** setelah hampir 2 tahun sepakbola kita tanpa penonton, kini diperbolehkan ada penontonnya. Saya berharap akan menambah gregat sepakbola tanah air yang akhir-akhir ini lesu. Namun fans sepakbola di Yogya mudah-mudahan mampu menjadikan introspeksi untuk tetap rukun, saling menjaga. Sepakbola itu kalau tidak kalah

yang menang. Tidak perlu merau-meraukan kenalpot sepeda motor jika tim nya kalah. Kita tetap jaga Yogya aghar menjadi kota yang tenang sebagai contoh kota yang sportif. Jangan membuat masyarakat tidak nyaman. Tunjukkan sebagai supporter berbudaya. □

*Ny Emi S, Tukangan, Yogyakarta*

### Introspeksi DIY Masuk Level 4

DIY termasuk yang 4 kabupaten dan kotanya masuk level 4. Artinya, dianggap 'bandel' tidak turun-turun. Sementara banyak provinsi lainnya sudah menunjukkan gejala penurunan yang terpapar Covid-19. Saya tidak tahu apakah nanti pelonggaran PPKM, akan berlaku bagi DIY? Sungguh memprihatinkan. Karena itu ayuk

kita mengajak diri sendiri dan lingkungan terdekat kita untuk taat pada protokol Kesehatan. Jangan terjebak euforia seolah-olah Covid-19 sudah musnah. Jika melayat atau menghadiri resepsi apapun, tetap jaga jarak dan dimanapun tetap pakai masker. □

*\*) Nugroho, Seturan, Carturunggal, Depok, Sleman.*

## Kedaulatan Rakyat

SIUUP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUUP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

**Pemimpin Umum:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito Mpd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budiarto, Mussahada. **MANAJER PRODUKSI Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustuti, Dra Prabadari, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afianti, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grasis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

**Pemimpin Perusahaan:** Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

**Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrk23@yahoo.com, iklankrk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris)... Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm... Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

**Alamat Kantor Utama dan Redaksi:** Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)